

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI NAGARI KAPEH PANJI JAYA TALOK PADA MASA PANDEMI COVID-19

Ummi Kalsum^{1(a)}, Adil Mubarak^{2(b)}

^{1,2}Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

^{a)}ummikalsum513@gmail.com, ^{b)}adilmubarak@fis.unp.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

15-03-2021

Selesai Revisi:

11-04-2022

Diterbitkan Online:

16-04-2022

Kata Kunci:

Implementasi Program,
Program Keluarga Harapan
(PKH)

Keywords:

Program Implementation,
Hope Family Program

Corresponding Author:

ummikalsum513@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok Pada Masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini dijalankan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yang mana pengumpulan data berdasarkan faktor yang menjadi pendukung utama pada objek penelitian. Dalam penelitian ini penarikan informan berdasarkan dengan teknik purposive sampling yang mana berdasarkan dengan kriteria utama yaitu harus merupakan masyarakat Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok. Dengan demikian pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Kemudian keabsahan data ini diuji dengan triangulasi sumber yang kemudian dianalisis. Berdasarkan hasil temuan dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di masa pandemic covid-19 di kenagarian Kapeh Panji Jaya Talaok sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik maupun sosialisasi yang dilakukan masih kurang efektif karna masih ada dari masyarakat yang tidak mengetahui jumlah bantuan yang diterima, apa saja syarat menjadi KPM, dan masih ada dari masyarakat yang menyalah gunakan bantuan tersebut Hal ini dapat dikatakan bahwa pendamping kurang maksimal dalam melaksanakan program keluarga harapan ini.

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok during the Covid-19 Pandemic. This research was carried out using a qualitative descriptive approach in which data collection was based on the factors that became the main supporters of the research object. In this study, the withdrawal of informants was based on a purposive sampling technique which was based on the main criteria, namely the people of Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok. This data collection is done by means of interviews, observation and documentation. Data analysis is done by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions. Then the validity of this data was tested by triangulation of sources which was then analyzed. Based on the findings, it can be concluded that the Implementation of the Family Hope Program during the Covid-19 pandemic in Kapeh Panji Jaya Talaok can be said to be going well and the socialization carried out is still not effective because there are still people from the community who do not know the amount of assistance received, what It's just a requirement to become a KPM, and there are still people who abuse this assistance.



PENDAHULUAN

Wabah Pandemi covid-19 semakin marak terjadi di Indonesia hal ini mengakibatkan semakin tingginya tingkat kemiskinan, dan saat pandemi ini masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi masyarakat yang bekerja hanya sebagai petani, pedagang dan buruh biasa, karna adanya wabah ini masyarakat tidak diperbolehkan untuk keluar rumah atau disebut juga dengan PSBB, sehingga daya beli masyarakat menurun, dan masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Saat sekarang ini dalam menjalankan fungsi dan tugasnya pemerintah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi masalah kemiskinan, yang berkaitan dengan aspek aspek lain seperti kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Pada dasarnya masyarakat miskin memiliki kelemahan dalam kemampuan mencukupi kebutuhan hidup serta kemampuan berusaha dan terbatasnya akses terhadap kegiatan sosial, ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi lebih tinggi. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan dalam bentuk kebijakan.

Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan pemerintah indonesia menyelenggarakan program Keluarga Harapan (PKH). Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Sebagai Program bantuan sosial bersyarat PKH membuka akses kepada keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas pendidikan yang tersedia disekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses

terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional (Kementerian Sosial Republik Indonesia).

Kemiskinan di Indonesia semakin mengemuka mengingat jumlah angka kemiskinan pada tahun 2020 di kabupaten pesisir selatan masih diatas rata-rata angka provinsi, bahkan masih dibawah target RPJM 2016-2021, yang mematokan kemiskinan pada 2018 hanya diangka 7,18. Seperti yang terlihat pada tabel data BPS kabupaten pesisir selatan dibawah ini bahwasanya Persentase penduduk miskin masih jauh diatas rata-rata angka provinsi.

Tabel 1. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	308 472,00	38,30	8,64
2014	322 425,00	35,02	7,82
2015	333 243,00	38,13	8,46
2016	366 228,00	35,86	7,92
2017	390 955,00	35,53	7,79
2018	409 882,00	34,92	7,59
2019	431 817,00	36,51	7,88
2020	467 743,00	35,46	7,61

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Pesisir Selatan, 2020

Pada tabel 1 diatas menjelaskan bahwa garis kemiskinan di Kabupaten pesisir selatan garis kemiskinan yang digunakan untuk menghitung penduduk miskin 2020 adalah Rp.467.743,00 sedangkan pada tahun Maret 2019 garis kemiskinan sebesar RP. 431.817,00 mengalami kenaikan sebesar RP. 159,271 penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Mulai dari tahun 2013 hingga 2020, jumlah penduduk miskin dikabupaten pesisir selatan.

Selama sejak tahun 2013 hingga 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pesisir Selatan berkurang sekitar 7,61 persen jiwa atau seperlima dari penduduk miskin di tahun 2013. Secara persentase, penurunan yang terjadi sebesar 1,03 poin. Dari 8,64 persen di tahun 2013 menjadi 7,61 persen pada tahun 2020.

Perkembangan tingkat kemiskinan selama 8 tahun terakhir ditunjukkan oleh tabel 1.

Tabel 2. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2013-2020

Tahun Year	Indeks Kedalaman Kemiskinan Poverty Gap Index	Indeks Keparahan Kemiskinan Poverty Severity Index
(1)	(2)	(3)
2013	0,88	0,14
2014	0,76	0,13
2015	0,84	0,15
2016	1,17	0,27
2017	1,07	0,25
2018	0,77	0,13
2019	0,76	0,13
2020	0,81	0,14

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan, 2020

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada periode Maret 2019–Maret 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (PI) mengalami sedikit kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2019 adalah 0,76, naik 0,05 poin menjadi 0,81 pada Maret 2020. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami perubahan, pada Maret 2020 sebesar 0,14.

Tabel 3. Jumlah Penerima Bantuan Sosial Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2020

Kecamatan Subdistrict	Jenis Bantuan Sosial/ Type of Social Assistance		
	Program Keluarga Harapan (PKH)	Jaminan Hidup Cacat Berat	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
(1)	(5)	(6)	(7)
1 Silaut	247	-	8
2 Lunang	771	-	-
3 Basa Ampek Balai Tapan	553	-	-
4 Ranah Ampek Hulu Tapan	751	-	-
5 Pancung Soal	948	-	-
6 Airpura	878	-	-
7 Linggo Sari Baganti	1.755	-	-
8 Ranah Pesisir	1.210	-	-
9 Lengayang	2.238	-	-
10 Sitera	2.000	-	-
11 Batang Kapas	1.053	-	-
12 IV Jurai	1.400	-	-
13 Bayang	1.468	-	-
14 IV Nagari Bayang Utara	342	-	-
15 Koto XI Tarusan	1.969	-	-
Pesisir Selatan	17.583	-	8

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan 2020

Pada saat sekarang Indonesia sedang diserang oleh wabah COVID-19, Pandemi menyebabkan masyarakat miskin kehilangan pekerjaan dan mengalami penurunan penghasilan. Kelompok yang paling terdampak adalah mereka yang bekerja di perkotaan dan sektor informal. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pembatasan operasi fasilitas publik, seperti sekolah dan angkutan umum, yang diterapkan Pemerintah Pusat ataupun pemerintah daerah (pemda) dalam upaya menghambat penyebaran COVID-19.

Pandemi (COVID-19) di Indonesia yang terjadi sejak awal Maret 2020 bukan hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga pada sektor-sektor lain, termasuk sosial-ekonomi. Dalam upaya menangani dampak tersebut, sejak Maret 2020 pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan strategi untuk mendukung meminimalisir kemiskinan pada saat pandemi.

Strategi yang dilakukan pemerintah pada saat pandemi COVID-19 pada PKH yaitu Anggaran yang disediakan mengalami beberapa kali peningkatan seiring peningkatan intensitas dampak dan dinamika pengelolaan keuangan negara. Anggaran tersebut semula Rp 405,1 triliun, kemudian terus bergerak naik hingga menjadi Rp695,2 triliun (Victoria, 2020). Dari jumlah tersebut, alokasi terbesarnya adalah untuk program perlindungan sosial yang mencapai Rp203,9 triliun atau sekitar 29,3% dari total anggaran. Program perlindungan sosial yang dilaksanakan terdiri atas delapan program. Dua program dengan alokasi anggaran terbesar adalah Program Sembako sebesar Rp43,6 triliun dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp37,4 triliun (Kemenko Perekonomian, 2020). Dalam rangka menangani dampak COVID-19, pemerintah meningkatkan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) Program Sembako dari 15,2 juta menjadi 20 juta dan meningkatkan nilai bantuan sebesar 33% (dari Rp150.000 menjadi Rp200.000).

Sementara itu, pada PKH, pemerintah meningkatkan jumlah KPM dari 9,2 juta menjadi 10 juta, dan strategi lainnya pemerintah meningkatkan nilai bantuan sebesar 25%. Pada Masa Pandemi COVID-19 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan Penambahan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan bantuan Sembako untuk KPM PKH bertujuan

meminimalisir KPM yang terdampak Covid-19, Dengan adanya program Sembako, diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran KPM dalam hal makanan, sehingga dapat membuat sebagian kebutuhan dasar masyarakat miskin terpenuhi. Selain itu, penambahan jenis bahan pangan yang diberikan dari program ini diharapkan dapat meningkatkan gizi masyarakat, terutama untuk menekan angka stunting di Indonesia. Untuk perlambatan ekonomi akibat Pandemi Covid-19. Dan pada saat Pandemi Covid ini adanya peningkatan jumlah KPM bantuan sosial PKH hingga 13.000, 8000 untuk PKH dan sisanya untuk sembako (Bupati Pesisir selatan Bapak Hendrajoni) Webside: <https://berita.pesisirselatankab.go.id/berita/detail/bupati-serahkan-kartu-sembako-untuk-kpm-baru-di-pancang-soal>

Pertengahan April 2020, KPM sudah bisa mencairkan bansos PKH setiap bulan hingga Desember 2020. Sebelumnya bansos PKH diberikan tiap tiga bulan sekali, yaitu di bulan Januari, April, Juli, dan Oktober (Menteri Sosial Juliari P). “Menurut Juliari, percepatan pencairan bertujuan agar keluarga pra-sejahtera tetap dapat memenuhi kebutuhan dan asupan nutrisi dengan memanfaatkan pemasukan uang bulanan selama pandemi. Terlebih, di masa pandemi ini, mereka mengalami kesulitan ekonomi lantaran tak bisa bekerja karena ada kewajiban untuk tinggal di rumah”. sesuai imbauan pemerintah. Ia mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah menyiapkan jaring pengaman sosial untuk keluarga prasejahtera Indonesia, agar dapat menjaga daya beli mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok. Juliari menambahkan, melalui PKH, pemerintah memberikan perlindungan sekaligus di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Webside: <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/08/12181141/antisipasi-dampak-pandemi-bansos-pkh-diberikan-sebulan-sekali-hingga?page=all>.

Gambar 1. Skema Bantuan PKH Sebelum Pandemi Covid-19 dan Pada Saat Pandemi Covid-19



Program PKH sudah dilaksanakan sebelum Indonesia diserang wabah covid-19, yaitu sejak tahun 2007, salah satu Nagari yang menjadi sasaran penyaluran PKH yaitu di Kenagarian Kapeh Panji jaya Talaok. Berdasarkan wawancara peneliti kepada salah satu pendamping di nagari kapeh panji jaya talaok, penerapan PKH di Nagari Kapeh Panji jaya Talaok ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2009, tetapi di nagari tersebut pelaksanaan PKH masih bergabung dengan Nagari Talaok, pada tahun 2018 Pelaksanaan PKH baru dipisah dan dilaksanakan di Nagari masing-masing (Idola et al., 2019).

Adapun strategi yang dilakukan Kementerian sosial pada saat pandemi covid-19 saat ini adalah dengan melakukan penambahan KPM PKH, memberikan KPM PKH bantuan sembako bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok KPM yang terkena dampak covid-19, pencairan bantuan PKH dilakukan tiap bulan pada saat pandemi-covid.

Dari penjelasan di atas peneliti melihat strategi yang dikeluarkan kementerian sosial tersebut belum sepenuhnya mengurangi permasalahan yang dihadapi masyarakat pada Masa pandemi covid-19 saat ini, spt penambahan pemberian sembako bagi KPM PKH yang mana tidak seluruhnya KPM PKH yang berda di nagari kapeh panii jaya talaok yang mendapatkan bantuan sembako hal ini lah yang akan dipermasalahkan karna adanya ketimpangan maka pelaksanaan program ini belum berjalan dengan semestinya.

Tabel 4. Jumlah Penerima PKH di Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok, Kecamatan Bayang

NO	KAMPUNG	2020	2021
1	Jambak	16	25
2	Ganting	34	44
3	Apa jaya	18	18
	Jumlah	68	87

Sumber: *Pendamping (Dokumen File Jumlah PKM PKH di Nagari Kapeh Panji Talaok Tahun 2020-2021)*

Di Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok, terdapat 230 masyarakat miskin (data kantor wali nagari kapeh panji jaya talaok tahun 2020) hal ini dapat kita lihat dari tabel diatas bahwa penerima PKH dinagari kapeh panji jaya talaok dari tahun ketahun ada sedikit penambahan, kita lihat di kampung apa jaya dari tahun 2020 sampai 2021 belum ada penambahan sama sekali sedangkan dikedua kampung lainnya ada penambahan hal ini akan mengakibatkan kecemburuan sosial dan implementasinya belum tercapai karna masyarakat miskin pada masa pandemi semakin meningkat, dan dapat dilihat masyarakat miskin dinagari tersebut lebih banyak dari jumlah penerima PKH, hal ini salah satu masalah yang membuat pengimplementasian PKH belum sepenuhnya terlaksana dengan semestinya.

Pada bulan April tahun 2021, di Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok Adanya keterlambatan pada saat proses penyaluran KPM, KPM yang seharusnya menrima pada bulan april tidak menerima pada bulan itu. Berdasarkan pemaparan data diatas bahwa pada saat pandemi covid-19 jumlah masyarakat miskin semakin meningkat dan pengimplementasian Program Keluarga Harapan di Nagari kapeh panji jaya talaok belum sepenuhnya tercapai, sementara yang menjadi tujuan Program keluarga harapan ini adalah:

Terdapat pada permensos no 1 tahun 2018 pasal 2 adapun Tujuan PKH adalah:

- Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- Menciptakan perubahan prilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;

- Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan;
- Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat

Tujuan utama dari PKH adalah meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia terutama pada kelompok masyarakat kurang mampu (miskin).

Implementasi Kebijakan ialah tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang, dimana hal ini terealisasi secara luas dan mempunyai makna penerapan, yang berguna untuk mencapai tujuan yang ditetapkan (Winarno, 2007).

Adapun tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) tertulis dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 2 yaitu: (a) meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, (b) mengurangi perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial, (c) mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, (d) mengenal manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

Penelitian ini dilakukan untuk dapat dijadikan evaluasi terhadap kinerja dari implementasi kebijakn PKH tersebut, dan dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif yang menggunakan sifat deskriptif akan melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti (Idrus, 2009). Penelitian dilaksanakan di Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Informan penelitian ditentukan dengan Teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk Analisa data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian data ini diuji keabsahannya dengan *triangulasi sumber* yang kemudian di analisis dengan teknik analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program keluarga harapan di Nagari kapeh Panji jaya talaok

Pelaksanaan program keluarga harapan bantuan langsung tunai yang diberikan kepada rumah tangga sangat miskin yang terdapat pada permensos no 1 tahun 2018 tentang Program keluarga harapan , Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19 dimana program ini sangat penting dilaksanakan untuk masyarakat untuk menunjang perekonomian pada masa pandemic Covid-19.

Hasil dari temuan peneliti, Program Keluarga harapan (PKH) yaitu dapat membantu masyarakat yang memiliki Perekonomian yang rendah , untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian. Bantuan ini dapat membantu kehidupan masyarakat terutama pada saat pandemi Covid-19 ini, dimasa pandemic ini pendapatan masyarakat sangat menurun drastis apalagi waktu diberlakukannya PSBB.masyarakat tidak boleh melakukan kegiatan diluar rumah yang mengakibatkan masyarakat yang bekerja sebagai petani, pedagang, atau masyarakat menengah kebawah dengan pekerjaan yang tidak tetap sehingga sangat berdampak pada pendapatan perekonomian mereka.

Setelah dirangkum, hasil penelitian kemudian akan dideskripsikan dengan indicator implementasi Menurut Charles O. Jones dalam (Suryana, 2009) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu:

a) Pengorganisasian

Charles O. Jones dalam (Rohman, 2001) menyebutkan bahwa Pengorganisasian merupakan pembentukan atau penetapan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjalankan program agar bisa berjalan. Pengorganisasian meliputi sumber daya, sarana dan prasarana, dalam Pelaksanaan Program Keluarga harapan ini minim karna pada saat Pandemi covid-19 ini adanya keterbatasan waktu dalam pelaksanaan Program ini, yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Program Keluarga harapan di Nagari kapeh panji Jaya Talaok adalah Pendamping PKH dan Pemerintah Nagari, untuk Prosedur pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dari pemerintah Pusat (Dinas

Sosial), sehingga pendamping PKH dan Pemerintah Pusat hanya menjalankan saja.

Dalam pengorganisasiannya pihak nagari mengutus kepala jorong untuk memberikan surat panggilan awal kepada calon KPM dan Pendampinglah nantinya yang akan menjelaskan materi bagaimana sistematika menjadi calon KPM PKH pada saat pertemuan awal. pertemuan yang dilakukan pendamping PKH pada saat pandemi covid-19 tidak dilakukan sehingga dalam pengorganisasian Pelaksanaan Program keluarga harapan kurang berjalan dengan prosedur yang telah ditetapkan,yang mana dalam pertemuan bulanan akan ada penyampaian segala informasi terkait pelaksanaan program keluarga harapan, nantinya segala informasi terkait pelaksanaan Program keluarga harapan dari pendamping PKH akan disampaikan oleh ketua kelompok PKH ketiap calon KPM ataupun yang telah menjadi KPM PKH.

Pendamping PKH dan Pihak dari pemerintah Nagari sudah menjalankan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan dikarenakan terkendala pada saat Pandemi covid-19 yang mengharuskan tidak dilakukan pertemuan kepada calon KPM maupun KPM PKH , dimana pada saat pertemuan awal dan penyampaian materi kepada calon KPM PKH yang seharusnya dilakukan untuk sementara dihentikan dulu, dan pendamping nantinya berkoordinasi dengan ketua kelompok supaya informasi mengenaiPKH dapat disampaikan oleh ketua kelompok.

b) Interpretasi

Dalam Mengoperasikan suatu Program Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Kasi bantuan dan jaminan sosial kabupaten Pesisir selatan menyebutkan bahwa sasaran yang ingin dituju dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini adalah Masyarakat yang tergolong keluarga sangat Miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya di Nagari kapeh Panji jaya Talaok.jika dilihat dari hasil penetapan KPM Keluarga harapan telah mengikuti dan memenuhi syarat menjadi penerima bantuan ini, namun kejadian dilapangan yang saya temui tidak sesuai dengan yang disebutkan oleh Kasi bantuan dan jaminan sosial dinas sosial kabupaten pesisir selatan yang mana masih banyak masyarakat yang

menjadi KPM PKH masyarakat yang tergolong mampu dan juga ada dari masyarakat yang sudah meninggal ataupun sudah pindah Kependudukannya tidak lagi tinggal dinagari kapeh panji masih menerima bantuan Program keluarga harapan ini. Dan masih banyak masyarakat yang menerima Program Keluarga Harapan ini orang yang dikategorikan keluarga mampu dan berkecukupan kebutuhan hidupnya.

Program keluarga harapan ini memberikan dampak yang sangat baik untuk keberlangsungan hidup masyarakat maupun peningkatan kualitas hidupnya di Nagari kapeh panji jaya Talaok.

c) Aplikasi/ penerapan

Charles O. Jones (dalam Arif Rohman, 2001) Aplikasi merupakan factor yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran atau hal lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Dalam mengoperasikan program keluarga harapan (PKH) ini Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

Dalam pelaksanaan Program keluarga harapan (PKH) di Nagari kapeh panji Jaya Talaok telah berjalan sesuai Prosedur yang telah ada , namun waktu pelaksanaannya kurang efektif karena adanya peraturan dari pemerintah pusat pada saat pandemi covid-19 yang diberlakukannya PSBB yang mana pertemuan dan pendampingan tidak dilakukan untuk sementara yang mengakibatkan calon KPM dan KPM PKH Kurang Memahami Informasi yang diberikan melalui Ketua kelompok saja. Pelaksanaan Penyaluran Program Keluarga Harapan ini sudah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada saat pandemi covid-19 ini, pada tahun 2020 dimulai pada bulan April pencairan dilakukan perbulan sebesar jumlah yang telah ditentukan.

Untuk mendukung upaya penanganan Covid-19, Pemerintah Pusat (Kementerian Sosial dan Dinas Sosial) telah memberikan Pengarahan kepada masyarakatnya untuk Tetap mematuhi segala Peraturan Pada saat pandemi covid-19 ini, namun dengan adanya aturan tersebut masih ada dari masyarakat yang tidak mengerti dengan segala Mekanisme program Keluarga harapan , yang mana ada dari

masyarakat tidak mengetahui jumlah bantuan yang diterima, dan apa saja Syarat-syarat menjadi calon KPM PKH baru, dan masih ada masyarakat yang menyalahgunakan Bantuan tersebut, nah maka dari itu pemerintah Pusat Sudah Mengoptimalkan Kinerjanya untuk tetap memberikan Pendampingan dan monitoring dengan cara menelusuri Rumah Masyarakat yang menjadi Calon KPM maupun yang sudah menjadi KPM PKH dan harus mematuhi segala aturan pada saat pandemi.

Aplikasi/ penerapan secara keseluruhan Prosedur dan pelaksanaan Program keluarga harapan ini yang dilakukan oleh Pendamping maupun Pihak nagari telah disampaikan dengan baik, akan tetapi Masyarakat terkendala karna adanya Pemberlakuan PSBB yang mana tidak boleh dilakukan pendampingan dan pertemuan sehingga masyarakat Sulit menerima Informasi yang disampaikan oleh Ketua kelompok PKH. Bahwa bantuan ini masih ada kejanggalan dalam pelaksanaannya, yaitu ketidak merataan yang mendapat bantuan, Kurang meratanya jumlah bantuan yang diberikan membuat kecemburuan antar masyarakat di nagari Kapeh Panji jaya Talaok dan membuat masyarakat bertanya mengapa bantuan ini tidak merata diberikan, padahal masyarakat yang tergolong mencukupi kebutuhan hidupnya mendapatkan bantuan.

Dapat dikatakan Pelaksanaan program Keluarga harapan di masa Pandemi Covid-19 di kenagarian Kapeh Panji jaya Talaok Kabupaten Pesisir Selatan bahwasanya yang bertanggung jawab Penuh dalam menjalankan Program Keluarga harapan (PKH) di Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok merupakan Pendamping PKH akan tetapi Pendamping PKH , Kementerian Sosial maupun Pihak nagari, Saling ber Kontribusi dalam menjalankan Program ini, bahwa dalam pelaksanaan Program ini Kementerian Sosial, Pendamping dan Pihak Nagari Saling Berkoordinasi, yang mana pada saat menjalankan Program Keluarga harapan ini Pihak dari Nagari mendata dan memasukkan data masyarakat miskin untuk dimasukkan ke data BDT yang di onlinekan langsung ke Pusat dan Kementerian sosial merekrut siapa saja nantinya yang akan menjadi calon KPM PKH, dan setelah itu Kementerian Sosial akan mengeluarkan Surat siapa saja yang menjadi calon KPM PKH , surat dikirimkan kepada Pendamping PKH di tiap Nagari, Pendamping PKH nantinya memberikan Surat Kekantor Nagari Agar dapat memberikan surat itu ke

rumah masyarakat yang keluar namanya menjadi calon KPM, nah setelah itu akan diadakannya Pertemuan P2 dan K2 kepada Calon KPM PKH, nah pada saat pertemuan ini nanti akan mensosialisasikan Program ini, apa saja syarat-syarat menjadi KPM, bagaimana pelaksanaan maupun Prosedur setelah menjadi KPM PKH nantinya agar masyarakat mengetahui bahwa adanya Program keluarga harapan ini, pada hal ini berdasarkan hasil yang disampaikan masyarakat bahwa pada saat pandemi ini diberlakukannya PSBB yang mengharuskan tidak boleh melakukan kegiatan Pertemuan maupun Pendampingan sosialisasi yang dilakukan hanya dari ketua kelompok PKH pendamping memberikan materi maupun informasi kepada Ketua kelompok dan ketua kelompok yang memberitahukan kepada Calon KPM dan KPM PKH, menurut Masyarakat Penerima maupun calon KPM pada saat pandemi ini Sosialisasi yang dilakukan kurang efektif karna keterbatasan waktu dan informasi yang disampaikan ketua kelompok kurang jelas sehingga masyarakat masih ada yang tidak mengetahui Program ini.

Penetapan Penerimaan sasaran Program ini merupakan Masyarakat sangat miskin yang belum terpenuhi kebutuhan pokok Hidupnya, ada 8 Komponen Penerima PKH yaitu :

- a) Ibu Hamil/Nifas;
- b) Anak Usia Dini 0-6;
- c) Anak SD/ Sederajat;
- d) Anak SMP / sederajat;
- e) Anak SMA / Sederajat;
- f) Penyandang disabilitas berat;
- g) Lansia 70 tahun keatas;
- h) TBC

Yang mana tujuan dari Program ini adalah untuk meningkatkan taraf kesenjangan Hidup Perekonomian maupun meningkatkan Pola Fikir Masyarakat kearah yang lebih baik, untuk menuju kesejahteraan untuk masyarakat.

Dalam mejalankan Program keluarga harapan Sejalan dengan dampak yang terjadi pada saat pandemi Covid-19, bahwasanya dikatakan masih ada masyarakat yang belum mengetahui Jumlah bantuan ,untuk apa tujuan dari bantuan tersebut digunakan, yang mana pada saat pademi ini masyarakat Kurang memahami apasaja yang telah disosialisasikan.

Faktor yang mempengaruhi Program keluarga Harapan (PKH) di nagari kapeh paniji jaya talaok pada saat pandemi covid-19

Implementasi Program keluarga Harapan (PKH) ini terdapat dalam aturan permensos no 1 tahun 2018 pasal 2 bahwa tujuan dari Program ini yaitu:

- a) Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- b) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c) Menciptakan perubahan prilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- d) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan;
- e) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat

Tujuan utama dari PKH adalah meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia terutama pada kelompok masyarakat kurang mampu (miskin).

Dan Program Keluarga harapan ini Juga sebagai salah satu Program dalam mengartasi adanya dampak dari pandemi covid-19 yang mana sdi masa pandemi covid-19 ini sangat berpengaruh bagi tingkat lesejahteraan masyarakat, sehingga peran pemerintah sangat diperlukan dalam pendistribusian bantuan tersebut.

Dalam Implementasi suatu Program tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program keluarga harapan (PKH). Edward mengidentifikasi ada empat Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program keluarga harapan (PKH):

- a) Komunikasi

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan bagaimana hubungan dilakukan.

- 1) Kelancaran penyampaian program

Dalam implementasi program keluarga harapan ada beberapa kegiatan dalam

pelaksanaannya, melakukan pertemuan P2K2, Sosialisasi, Pertemuan awal, Pemuthakhiran data, Verifikasi dan Validasi data. penyampaian Program keluarga harapan (PKH) Pihak Pendamping di nagari kapeh Panji Jaya Talaok, pada saat pelaksanaan Program ini seharusnya pendamping dalam melakukan Sosialisasi lebih maksimal lagi.

Yang menjadi kendala dalam penyampaian Program keluarga Harapan (PKH) yaitu Kurangnya Koordinasi antar masyarakat dengan Pendamping karena terkendala pada situasi pandemi covid-19 ini masyarakat kurang memahami segala informasi yang diberikan karena pertemuan tidak dilakukan pada saat pandemi, sehingga masyarakat masih ada yg belum mengetahui apa saja syarat-syarat yang akan dipenuhi untuk menjadi KPM PKH, masyarakat masih ada yang belum mengetahui jumlah bantuan yang diterima dan juga ada masyarakat yang menyalah gunakan bantuan, karena dalam penyampaian informasi yang diterima hanya melalui ketua kelompok dan juga masyarakat tidak semuanya memiliki handphone dalam menerima informasi yang disampaikan.

2) Kejelasan perintah dan arahan program

Pelaksana yang terlibat dalam Program keluarga harapan dinagari Kapeh Panji jaya talaok bahwa mereka sudah saling melakukan koordinasi dalam menyampaikan informasi mengenai kejelasan perintah dengan jelas dan mereka juga telah menjalankan tugas masing-masing sesuai ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat, sesuai fakta dilapangan dan hasil observasi yang dilakukan peneliti di nagari kapeh panji jaya talaok walaupun pada saat pandemi ada beberapa Prosedur yang tidak berjalan dengan semestinya dikarenakan adanya pandemi, sehingga informasi dan sosialisasi yang seharusnya disampaikan langsung kemasayarakat kurang jelas dan ada beberapa dari masyarakat juga mengeluh karena informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan ataupun prosedur yang disampaikan oleh ketua kelompok tidak tersampaikan secara menyeluruh karena pendamping hanya berkoordinasi dengan ketua kelompok pkh.

3) Konsistensi perintah

Melalui sosialisasi dan pertemuan FDS/P2K2 pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, pertemuan Awal bagi calon KPM

mengenai materi-materi terkait Program Keluarga Harapan, yang disampaikan kepada Pihak nagari dan Ketua kelompok PKH, agar dapat diberitahukan kepada calon KPM dan KPM PKH pada saat pandemi ini, dan melalui hal ini juga diharapkan pelaksanaan dilapangan dapat berjalan lancar, terencana dengan yang diharapkan serta berjalan sesuai fungsinya.

Pelaksanaan yang disampaikan Pendamping PKH pada Pihak Nagari dan Ketua kelompok di nagari kapeh panji jaya talaok sudah jelas, hanya saja pada nagari kapeh panji jaya talaok pelaksanaannya terhalang karena pandemi ini yang membuat beberapa dari pelaksanaan Program tidak berjalan dengan semestinya seperti pertemuan awal pada Calon KPM PKH tidak diadakan pertemuan dan Pertemuan P2K2 yang mana kegiatan ini merupakan sarana komunikasi antara pendamping dengan KPM untuk menyampaikan informasi terbaru tentang PKH, pertemuan ini juga sebagai sarana untuk bertukar pendapat serta tetap mengingatkan para anggota KPM untuk tetap giat dalam kegiatan posyandu maupun sekolah

b) Sumber Daya

Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas konsistensinya ketentuan – ketentuan atau aturan – aturan kebijakan, jika para personil bertanggung jawab mengimplementasikan suatu kebijakan kurang mempunyai sumber – sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bias efektif.

Disamping itu, harus ada ketetapan atau kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan. Dana untuk membiayai operasional implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan dan kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut.

1) Jumlah Staff

Dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) pada saat pandemi ini dibentuk kembali struktur organisasi pengurusan kuss untuk menjalankan beberapa pelaksanaan PKH, Pendamping PKH dinagari kapeh panji jaya talaok yang bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan PKH ini, pada saat pandemi pendamping PKH tidak melakukan pertemuan

jadi pendamping saling berkoordinasi dengan ketua kelompok di tiap kampung yang ada di nagari kapeh panji jaya talaok untuk menyampaikan segala informasi terbaru kepada ketua kelompok dan ketua kelompok yang nantinya menginformasikan nya kepada KPM PKH, berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan peneliti melihat bahwa pelaksanaannya kurang efektif karena ada dari masyarakat yang tidak memahami Program ini, dalam penerimaan informasi kurang jelas yang disampaikan oleh ketua kelompok melalui wa atau telphone.

2) Fasilitas pendukung

Fasilitas pendukung untuk kelancaran pelaksanaan program keluarga harapan harapan (PKH) di nagari kapeh panji jaya talaok pada saat pandemi masih kurang dimana untuk menyampaikan informasi terkait pelaksanaan PKH hanya dilaksanakan oleh ketua kelompok melalui via WA dan telphone saja, selain itu tidak ada dilakukan pertemuan dengan ketua kelompok disaat pandemi ini sehingga informasi yang disampaikan kurang dipahami oleh KPM dan Calon KPM PKH sehingga ada dari KPM yang tidak mendapatkan bantuan dibulan berikutnya karena informasi yang disampaikan kurang jelas disampaikan pendamping.

3) Pelimpahan Wewenang

Wewenang yang dimaksud disini adalah kepentingan yang mempengaruhi dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Adanya suatu kepentingan bagi pelaksana kebijakan itu sendiri seperti kepentingan bagi pihak Pendamping PKH, kesehatan (bidan desa), pendidikan (guru sekolah), pihak nagari, KPM PKH maupun ketua kelompok Bidang tersebut sangat mendukung dalam pelaksanaan kebijakan ini. Karena unsur itu yang menjadi tujuan Program Keluarga Harapan. Adapun berbagai pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan program keluarga Harapan di Nagari kapeh panji jaya talaok memiliki peranan yang penting.

Dilapangan kategori adanya kepentingan untuk masyarakat pelaku sasaran kebijakan program bahwa ada beberapa hal yang menghambat pelaksanaan program keluarga berencana bahwa program ini untuk kepentingan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup mereka melalui pemberian

bantuan non tunai berdasarkan Komponen yang ada didalam program ini.

Akan tetapi pada saat pandemi ini masyarakat banyak yang tidak memahaminya manfaat dari Program keluarga harapan ini masih ada dari masyarakat yang menyalahgunakan bantuan, peneliti melihat langsung di lapangan dan melakukan observasi di nagari kapeh panji masyarakat yang mendapatkan bantuan kesehatan dan pendidikan menggunakan bantuannya untuk membeli baju, TV, dan lemari dan perabotan rumah tangga lainnya, kenapa hal ini terjadi karena keterbatasan informasi dan sosialisasi pada saat pandemi ini sehingga masyarakat tidak mengetahui tujuan dari program keluarga harapan ini.

c) Disposisi (Sikap)

Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut

1) Pemahaman pelaksana

Dalam pelaksanaan program Keluarga Harapan tentunya pemahaman pelaksana terhadap program sangat penting. Karena itu menandakan bahwa program berjalan dengan lancar atau tidak. Maka dari itu sosialisasi dan juga rapat koordinasi dengan pihak kementerian dan antar pelaksana juga sangat penting. Karena Di dalam sosialisasi maupun koordinasi memiliki informasi dan pemahaman yang meliputi latar belakang program Keluarga Harapan kebijakan pemerintah, tujuan, sasaran, pengelolaan, pengorganisasian, pengawasan dan pelaporan serta hak dan kewajiban masing-masing.

Pada saat menjalankan pemahaman pelaksana program keluarga Harapan pendamping PKH sudah memiliki pengetahuan yang cukup, karena mereka sudah diberikan pelatihan terlebih dahulu oleh pihak kementerian dikabupaten dan juga modul ,dan pedoman umum terkait pelaksanaan program, terkait pada saat pandemi tidak diberlakukan mengadakan pertemuan bulanan ke KPM PKH , pendamping tetap memberikan informasi kepada kpm melalui ketua kelompok, dan ketua

kelompok akan diarahkan oleh pendamping apa saja informasi terbaru terkait pelaksanaan program keluarga harapan ini kepada KPM.

2) Arah respon pelaksana

Dalam menjalankan program Keluarga harapan, setiap Pendamping sosial yang ada memiliki cara yang berbeda dalam pelaksanaan kegiatannya. Hal ini bergantung dari perintah penanggung jawab dan juga hasil rapat. Arah respon pelaksana dalam menjalankan juga menentukan apakah pelaksanaan berjalan atau tidak. Karena program sangat bergantung dengan adanya petugas pelaksana yang mengerti akan jalannya program.

Dalam menjalankan program Keluarga Harapan ini pendamping menerima dengan pelaksanaan program ini karena adanya larangan dari kementerian sosial untuk tidak melakukan pertemuan karena adanya pandemi karena memang sudah menjadi tugas dan tanggungjawab mereka dalam melaksanakan program Keluarga harapan ini. Tentu saja setiap Pendamping memiliki cara-cara yang berbeda dalam mengimplementasikan program keluarga harapan ini sesuai dengan hasil rapat mereka, Pendamping PKH dinagari kapeh panji jaya talaok mereka lebih menggunakan cara pelaksanaan PKH pada saat pandemi ini yaitu saling berkoordinasi dengan Pihak Nagari, Ketua kelompok PKH, dan pada komponen kesehatan dan pendidikan juga saling berkoordinasi karena keterbatasan waktu dan pandemi. Menurut pantauan penulis, pelaksana menerima adanya pelaksanaan program Keluarga Harapan ini karena memang bagian dari pekerjaan mereka jadi mau tidak mau mereka memang harus melaksanakan program keluarga Harapan tersebut.

3) Intensif pelaksana

Dalam menjalankan program Keluarga Berencana intensif pelaksana sangat diperlukan. Apalagi jika suatu program yang dilaksanakan sangat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat. Intensitas pelaksana menjadi suatu tumpuan program sehingga program berjalan dengan lancar dan berkelanjutan.

Dari faktor yang ketiga ini dalam pelaksanaan program Keluarga Harapan dinagari kapeh panji jaya talaok yaitu mengenai penyampaian informasi dalam pelaksanaan Program tidak tersampaikan secara keseluruhan karena adanya pandemi, dalam pemahaman ketua kelompok PKH pada saat penyampaian

informasi kepada calon KPM dan KPM masih kurang tersampaikan secara keseluruhan dan juga masih memiliki pemahaman ala kadarnya karena pendamping hanya berkoordinasi dengan ketua kelompok melalui via wa dan telfon, dan yang menjadi ketua kelompok PKH juga dari masyarakat penerima bantuan, dan tidak berpengalaman dalam hal ini, karena demikian informasi yang didapat dari pendamping tidak semuanya ditangkap oleh ketua kelompok, yang saya lihat dilapangan masyarakat masih tidak memahami Pelaksanaan Program ini, tidak mengetahui jumlah bantuan yang diterima, menyalah gunakan bantuan, dan karena informasi yang terbatas hanya melalui ketua kelompok saja ada masyarakat yang bantuannya tidak cair karena KPM tidak menyerahkan persyaratan dalam hal administrasi dan disposisi pelaksana masih kurang baik.

d) Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi bisa jadi masih belum efektif karena keefisienan struktur birokrasi yang ada.

1) Standar Prosedur Operasional

Indikator keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari PKH untuk mandiri dan secara sukarela melepaskan diri untuk tidak lagi menerima bantuan sosial keluarga harapan yang selama ini didapatkan, indikator itu harus menjadi target utama program PKH, karena itu target graduasi ini harus dilakukan secara terukur dan sistematis melalui pendampingan SDM PKH, pendamping PKH harus dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan memberikan pengetahuan memulai usaha, memasarkan produk dan mendorong produktifitas potensi yang dimiliki para KPM PKH.

Indikator keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari PKH untuk mandiri dan secara sukarela melepaskan diri untuk tidak lagi menerima bantuan sosial keluarga harapan yang selama ini didapatkan, indikator itu harus menjadi target utama program PKH, karena itu target graduasi ini harus dilakukan secara terukur dan sistematis

melalui pendampingan SDM PKH, pendamping PKH harus dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan memberikan pengetahuan memulai usaha, memasarkan produk dan mendorong produktifitas potensi yang dimiliki para KPM PKH.

Dari hasil wawancara dan pengamatan dilapangan beberapa prosedur pelaksanaan program sesuai yang telah ditetapkan kemensos untuk tidak melakukan pertemuan bulanan (P2K2) , jadi beerapa kegiatan dalam pelaksanaan program keluarga harapan tidak berjalan dengan semestinya , pertemuan bulanan merupakan salah satu indikator dalam keberhasilan program keluarga harapan, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan dan pengelolaan keuangan bagi keluarga penerima manfaat (KPM). pendamping berkoordinasi dengan ketua kelompok PKH untuk menyampaikan informasi terkait pelaksanaan PKH, seperti memberikan modul, materi-materi,brousure untuk disampaikan ke KPM sehingga masyarakat paham dengan Program keluarga Harapan ini,tetapi yang saya lihat dilapangan masih ada masyarakat yang tidak mengetahui manfaat Program keluarga harapan ini, ketua kelompok kurang memahami bagaimana prosedur pelaksanaan Program ini karna masyarakat tidak mengetahui untuk apa bantuan itu digunakan, dan juga KPM PKH dinagari kapeh panji jaya talaok saya lihat sudah menumbuhkan jiwa kewirausahaannya, ada dari KPM yang sudah memiliki usaha kecil-kecilan dirumah,berjualan makanan ringan, dan ada juga yang menjual jagung dan sayur dipasar, tapi yang disayangkan KPM yang sudah meningkat perekonomiannya tidak mau dengan sukarela melepaskan diri untuk menerima bantuan”

2) Kelembagaan Lokal

Kelembagaan lokal juga menjadi dukungan suatu kebijakan. Dengan bantuan dari kelembagaan lokal juga menjadikan suatu kebijakan dapat berjalan dengan semestinya dan mencapai tujuan yang diharapkan.Demi kelancaran dan berjalannya program Keluarga Harapan , disuatu daerah tentunya dukungan dari kelembagaan lokal menjadi suatu hal yang sangat penting. Dukungan ini bisa berbentuk pasrtisipasi maupun dukungan moral terhadap program ini.

Dapat dilihat bahwa tidak ada kelembagaan Lokal yang mendukung pelaksanaan Program keluarga harapan(PKH). , yang ikut serta dalam membantu kegiatan-kegiatan Program ini komponen dibidang Kesehatan dan Pendidikan yang dinamakn Faskes (fasilitas Kesehatan) dan Fasdik (Fasilitas Pendidik),pada Fasdik bidan desa akan mengadakan posyandu, dan jaminan kesehatan bagi komponen PKH Ibu Hamil/Blita, dan pada Fasdik memberikan Fasilitas sekolah untuk anak penerima PKH, karna adanya Pandemi kegiatan yang dilakukan dalam komponen kesehatan dan pendidikan tidak dilkakukan karna pemerintah melarang adanya perkumpulan, nah disini pendamping dalam menfasilitasi ibu hamil/balita untuk sementara waktu tdk dilakukan kegiatan posyandu bidan desa hanya memeriksa kesehatan ibu hamil/balita dan memberikan vitamin akan tetapi pada komponen pendidikan Pihak sekolah tetap memberikan tugas, pengambilan absen dan kegiatan sekolah lainnya melalui Daring, pada saat pengecekan dilapangan pendamping akan berkoordinasi dengan Bidan desa dan Guru yang berada diNagari Kapeh Panji untuk melakukan verifikasi apakah Komponen Pendidik melaksanakan kegiatan sekolah atau tidaknya.

3) Dukungan Elite Lokal

Salah satu faktor yang memepengaruhi keberhasilan pelaksanaan dari suatu kebijakan adalah dukungan dari elite lokal. Didalam pelaksanaan program Keluarga Berencana dukungan elite lokal juga menjadi suatu hal yang mempengaruhi pelaksanaannya. Dukungan elite lokal dalam bentuk moral, pasrtisipasi dan juga ide - ide menjadi suatu support tersendiri untuk program ini, dimana elite lokal juga ingin terlibat didalamnya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Program Keluarga harapan di masa pandemic covid-19 di kenagarian Kapeh panji Jaya Talaok sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik, namun peran pendamping disini cukup minim karna kendala pada saat pelaksanaan pertemuan bulanan yang tidak dilakukan. Ini dilihat dari fakta dilapangan bahwasanya dalam penyampaian Informasi maupun sosialisasi yang dilakukan masih kurang efektif karna masih ada dari masyarakat yang tidak

mengetahui jumlah bantuan yang diterima, apa saja syarat menjadi KPM, dan masih ada dari masyarakat yang menyalah gunakan bantuan tersebut Hal ini dapat dikatakan bahwa pendamping kurang maksimal dalam melaksanakan program keluarga harapan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Idola, D., Bachtiar, H., & Abdiana, A. (2019). Analisis Pelaksanaan Family Development Session Bidang Sanitasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lengayang. *Jurnal Kesejahteraan Andalas*, 8(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.25077/jka.v8i3.1040>
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Gelora Akasara.
- Rohman, A. (2001). *Kebijakan Pendidikan Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Aswaja Pressindo.
- Suryana, S. E. L. (2009). *Implementasi Kebijakan Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang*. Universitas Sumatera Utara.
- Victoria, A. O. (2020, June 20). Ketua MPR Soroti Hitungan Anggaran Covid-19 yang Terus Naik. *Kata Data*. <http://katadata.co.id/berita/2020/06/20ketua-mpr-soroi-hitungan-anggaran-terus-naik>.
- Winarno, B. (2007). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo.
- Surat Edaran Kementerian Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Tanggal 17 April No. 1579/6/DI.01/04/2020 tentang Bantuan Sosial Tunai.
- PERMENSOS RI No 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan, (Kabupaten Pesisir Selatan dalam angka 2021.
- Pedoman Pelaksanaan PKH (2020). Hal: 186-188.
- Profil kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019, No. 1/01/1302/th.2020,3 januari 2020.
- Catatan Penelitian simeru, No.2/2020. Pelaksanaan PKH dan Program Sembako dalam rangka mitigasi dampak Covid-19.
- Kemenko Perekonomian (2020) 'Dukungan Fiskal untuk Penanganan COVID-19.'